


Literasi Hukum dan Administrasi Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing di Bali

Legal Literacy and Residence Permit Administration: A Case of Foreign Nationals in Bali

I Gede K. Ananta Yoga*, I Putu Suparna, I Made Sudiksa

Universitas Pendidikan Nasional

Vol. 6 No. 2, Desember
2025

 DOI:
10.35311/jmpm.v6i2.708

Informasi Artikel:

Submitted: 22 Agustus
2025

Accepted: 25 Desember
2025

*Penulis Korespondensi :

I Gede K. Ananta Yoga
Universitas Pendidikan
Nasional

E-mail :
ananta.yoga96@gmail.com
No. Hp : 081916376414

Cara Sitasi:

Yoga, I, G, K, A., Suparna, I, P., Sudiksa, I, M. (2025). Literasi Hukum dan Administrasi Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing di Bali. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*. 6(2). 908-913. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v6i2.708>

ABSTRAK

Bali merupakan salah satu destinasi utama bagi Warga Negara Asing (WNA) yang datang baik untuk berlibur maupun tinggal sementara. Tingginya jumlah WNA yang masuk, tercatat lebih dari 71.000 izin tinggal pada tahun 2023, berimplikasi pada semakin kompleksnya pengelolaan izin tinggal di daerah ini. Sayangnya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, baik berupa overstay, penyalahgunaan visa, maupun kesalahan administratif. Fenomena ini tidak selalu disebabkan oleh niat untuk melanggar, melainkan sering kali berakar dari lemahnya literasi hukum dan administrasi yang dimiliki oleh WNA, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PT Putra Nadi Wibawa (PNW), sebuah biro jasa yang bergerak di bidang pengurusan izin tinggal WNA di Bali. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi hukum dan administrasi izin tinggal melalui asesmen awal, workshop literasi hukum, dan simulasi administratif. Sebanyak 65 WNA dari berbagai latar belakang izin tinggal serta 20 staf PT PNW terlibat secara aktif. Metode evaluasi yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah dengan memberikan pre test dan post test. Pre test dilakukan sebelum dilakukan pelatihan, sedangkan post test dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan. Materi pre test dan post test adalah tentang literasi dan administrasi Warga Negara Asing yang datang dan tinggal di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata literasi hukum naik sebesar 46,4% setelah mengikuti program. Lebih dari 80% peserta aktif berpartisipasi, dan tingkat kepuasan mencapai 84,6% dengan mayoritas menyatakan sangat puas. Kegiatan ini berhasil menunjukkan bahwa intervensi berbasis literasi hukum dan administrasi dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan WNA.

ABSTRACT

Bali is one of the main destinations for Foreign Nationals (FNs) who come either for tourism or temporary residence. In 2023, more than 71,000 residence permits were issued, reflecting the increasing complexity of managing foreign residents in the region. Unfortunately, violations such as overstays, visa misuse, and administrative errors remain prevalent. These violations are not always intentional but often stem from weak legal and administrative literacy among FNs, including limited understanding of their rights, obligations, and the legal consequences stipulated by Indonesian regulations. This community service program was carried out at PT. Putra Nadi Wibawa (PNW), a service bureau specializing in residence permit arrangements for FNs in Bali. The main objective was to enhance legal and administrative literacy through initial assessments, legal literacy workshops, and administrative simulations. A total of 65 FNs with diverse residence permit statuses and 20 PNW staff members actively participated. The evaluation method used in this training was conducted by administering a pre-test and a post-test. The pre-test was carried out before the training, while the post-test was conducted after the completion of the training. The pre-test and post-test materials focused on literacy and administrative aspects related to foreign nationals who come to and reside in Indonesia. Evaluation results revealed a significant improvement in participants' understanding, with average literacy scores increasing by 46.4% after the program. More than 80% of participants were actively engaged, and satisfaction levels reached 84.6%, with the majority expressing strong approval. The program demonstrated that literacy-based interventions are effective in preventing residence permit violations and fostering greater legal awareness among FNs. Moreover, the involvement of PNW staff strengthened institutional capacity to provide professional services.

Keywords: Legal literacy, residence permit administration, foreign nationals, Bali

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu destinasi utama bagi Warga Negara Asing (WNA), baik untuk tujuan pariwisata maupun tinggal

sementara dalam berbagai kepentingan seperti bekerja, berinvestasi, maupun menempuh pendidikan. Tingginya mobilitas



WNA ke Bali tercermin dari data Imigrasi Ngurah Rai yang pada tahun 2023 mencatat penerbitan sebanyak 71.001 izin tinggal. Jumlah tersebut terdiri atas 42.311 Izin Tinggal Kunjungan (ITK), 22.346 Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), 3.831 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 410 Izin Tinggal Tetap (ITAP) (www.bali.antaranews.com, 2024). Data ini menunjukkan besarnya arus WNA ke Bali sekaligus menggambarkan kompleksitas kebutuhan administrasi keimigrasian serta pentingnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum WNA di Indonesia.

Tingginya jumlah WNA yang berkunjung dan tinggal sementara di Bali juga berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran keimigrasian, khususnya pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi overstay dan penyalahgunaan visa. Beberapa kasus yang mencuat ke publik antara lain seorang WNA asal Kroasia yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja memasarkan properti dan akhirnya dideportasi (www.bali.antaranews.com, 2024), seorang WNA asal Swiss yang mengalami overstay selama 275 hari karena kelalaian memperpanjang izin tinggal (www.detik.com), serta seorang WNA Jerman yang overstay lebih dari 2,5 bulan sebelum dideportasi pada pertengahan tahun 2025 (www.infopublik.id). Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran izin tinggal masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan keimigrasian di Bali.

Meningkatnya pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Bali tidak sepenuhnya disebabkan oleh unsur kesengajaan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi akibat lemahnya literasi hukum dan administrasi keimigrasian yang dimiliki oleh WNA.

Minimnya pemahaman mengenai jenis visa yang sesuai dengan tujuan tinggal, prosedur perpanjangan izin, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran administrasi seringkali membuat WNA berada pada posisi yang rentan terhadap sanksi berupa denda hingga deportasi. Selain itu, keterbatasan akses informasi yang mudah dipahami serta penggunaan bahasa hukum yang kaku turut memperbesar kesenjangan pemahaman WNA terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan administrasi juga memunculkan

kesalahpahaman WNA terhadap kewajiban mereka sebagai subjek hukum di Indonesia. Sebagian WNA memandang izin tinggal semata sebagai formalitas administratif, tanpa menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak pada ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, serta keamanan masyarakat lokal.

Kondisi ini berkontribusi pada munculnya praktik ilegal, seperti bekerja menggunakan visa kunjungan, penyalahgunaan izin investasi, maupun kelalaian dalam memperpanjang izin tinggal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan administrasi bagi WNA menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk melindungi WNA dari sanksi hukum, tetapi juga untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi internasional yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Sukanto (2008), kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat dalam menaati hukum. Dalam konteks WNA di Bali, rendahnya kesadaran hukum kerap dipengaruhi oleh minimnya literasi terhadap administrasi keimigrasian. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sulistyowati (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum menjadi langkah strategis dalam menekan angka pelanggaran izin tinggal oleh WNA.

Literasi hukum tidak akan berjalan efektif apabila subjek hukum tidak memahami substansi dan prosedur hukum yang berlaku. Rahardjo (2009) menegaskan pentingnya pendidikan hukum yang bersifat praktis untuk menjembatani perbedaan latar belakang budaya dan bahasa, sebagaimana dialami oleh WNA dalam mengurus izin tinggal di Indonesia.

Penelitian UNWTO (2021) mengenai pariwisata berkelanjutan juga menekankan bahwa regulasi keimigrasian di destinasi wisata harus dipahami oleh wisatawan maupun ekspatriat guna mencegah dampak negatif terhadap keamanan serta kondisi sosial-ekonomi lokal. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali membutuhkan strategi edukasi hukum yang tepat agar keberadaan

WNA tidak menimbulkan permasalahan administratif maupun sosial.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PT. Putra Nadi Wibawa (PT. PNW), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan visa dan izin tinggal WNA di Indonesia. PT. PNW melayani berbagai jenis klien, mulai dari wisatawan jangka panjang, pekerja ekspatriat, investor, hingga pelajar asing. Data internal PT. PNW menunjukkan bahwa komposisi pengurusan izin tinggal terdiri atas 59,6% Izin Tinggal Kunjungan (ITK dan VKSK), 31,5% Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 0,6% Izin Tinggal Tetap (ITAP). Data ini mencerminkan tingginya kebutuhan layanan administrasi keimigrasian sekaligus potensi risiko pelanggaran apabila tidak disertai pemahaman hukum yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelanggaran izin tinggal oleh WNA di Bali tidak semata-mata disebabkan oleh niat melanggar hukum, tetapi juga oleh lemahnya literasi hukum dan administrasi keimigrasian. Rendahnya pemahaman terhadap aturan, prosedur, serta konsekuensi hukum menjadikan WNA rentan melakukan kesalahan administratif yang berdampak pada sanksi maupun deportasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan WNA secara individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta citra negatif bagi Bali sebagai destinasi internasional.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan administrasi izin tinggal bagi WNA di Bali agar mereka memahami secara jelas prosedur, hak, dan kewajiban yang berlaku. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal, mendorong kepatuhan hukum, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara WNA, masyarakat lokal, dan pemerintah. Dengan demikian, Bali dapat terus mempertahankan reputasinya sebagai destinasi wisata dan investasi global yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena bertujuan

menggambarkan secara mendalam tingkat literasi hukum dan administrasi izin tinggal WNA serta efektivitas kegiatan edukasi yang dilaksanakan. Melalui pendekatan ini, data diperoleh bukan hanya dari angka-angka, tetapi juga dari pengalaman, pemahaman, dan respon langsung dari khalayak sasaran, yaitu WNA sebagai penerima manfaat serta staf PT. PNW sebagai fasilitator. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan melalui asesmen awal. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara singkat serta memberikan kuesioner kepada WNA dan staf PT. PNW untuk memotret kondisi literasi hukum serta kesulitan administrasi yang dialami.

Tahap kedua dilaksanakan melalui workshop literasi hukum dengan memberikan edukasi tentang jenis izin tinggal, prosedur perpanjangan, hak dan kewajiban WNA serta konsekuensi hukum pelanggaran. Tahap ketiga adalah pasca kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi. Tahap ini dilakukan melalui diskusi kelompok untuk menggali pengalaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di PT. PNW dengan melibatkan dua kelompok utama, yaitu Warga Negara Asing (WNA) sebagai peserta utama dan staf PT. PNW sebagai fasilitator pendamping. Jumlah peserta WNA yang hadir tercatat sebanyak 65 orang dengan latar belakang izin tinggal yang beragam: 38 orang (58,5%) pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK/VKSK), 22 orang (33,8%) pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan 5 orang (7,7%) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP). Sementara itu, sebanyak 20 staf PT PNW turut hadir dalam kegiatan untuk memperkuat kapasitas sebagai penyedia jasa pendampingan administrasi izin tinggal.

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Pertama, asesmen awal berupa kuesioner singkat dan wawancara, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (61,5%) masih kurang memahami prosedur perpanjangan izin tinggal, serta 26% pernah mengalami kesalahan administratif seperti keterlambatan pelaporan atau pengisian formulir.

Kedua, workshop literasi hukum yang menyajikan materi tentang jenis-jenis izin

tinggal, prosedur perpanjangan, hak dan kewajiban WNA, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Materi disampaikan dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris) untuk memudahkan pemahaman. Ketiga, simulasi administrasi, di mana peserta berlatih langsung mengisi dokumen perpanjangan izin tinggal dan berkonsultasi terkait kasus spesifik yang mereka alami.

Tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PT. PNW diukur melalui beberapa indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pertama, dari aspek peningkatan literasi hukum dan administrasi izin tinggal WNA, keberhasilan ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Skor rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 2,8 menjadi 4,1 pada skala 1–5, yang berarti terdapat peningkatan sebesar 46,4%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik setelah mengikuti kegiatan.

Kedua, dari aspek partisipasi dan keterlibatan peserta, keberhasilan diukur dari tingkat kehadiran dan keaktifan dalam sesi workshop, simulasi, dan legal clinic. Data

menunjukkan lebih dari 80% peserta terlibat aktif dalam diskusi maupun simulasi administrasi, sehingga tujuan pembelajaran partisipatif dapat tercapai. Ketiga, dari aspek kepuasan peserta, hasil angket menunjukkan 84,6% peserta merasa sangat puas dan 15,4% puas terhadap penyelenggaraan kegiatan, terutama pada aspek kejelasan materi dan ketersediaan modul bilingual.

Selain itu, dari sisi staf PT PNW sebagai fasilitator, keberhasilan diukur melalui wawancara evaluatif. Hasilnya, 85% staf merasa lebih percaya diri dalam memberikan edukasi hukum kepada klien. Indikator terakhir adalah keberlanjutan program, yang ditandai dengan adanya komitmen PT PNW untuk menyelenggarakan program literasi hukum rutin minimal dua kali dalam setahun.

Dengan demikian, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari hasil jangka pendek berupa peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga dari dampak jangka panjang berupa penguatan kapasitas lembaga dalam memberikan layanan hukum dan administrasi kepada WNA di Bali. Secara detail keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tolak Ukur Keberhasilan Kegiatan PkM

Indikator	Alat Ukur	Target Ketercapaian	Hasil yang Dicapai	Keterangan
Peningkatan literasi hukum & administrasi WNA	Pre-test & post-test (skala 1–5)	≥ 70% peserta mengalami peningkatan skor ≥ 20%	Rata-rata skor meningkat dari 2,8 → 4,1 (naik 46,4%)	Target tercapai
Partisipasi peserta	Kehadiran & keaktifan dalam workshop/simulasi	≥ 80% peserta aktif mengikuti seluruh sesi	85% peserta hadir penuh dan aktif dalam diskusi	Target tercapai
Kepuasan peserta	Angket kepuasan (skala Likert 1–5)	Rata-rata minimal 4,0	Rata-rata kepuasan 4,3; 84,6% sangat puas, 15,4% puas	Target tercapai
Peningkatan kapasitas staf PT PNW	Wawancara & observasi kemampuan menyampaikan materi	≥ 80% staf mampu menjelaskan kembali materi dengan baik	85% staf merasa lebih percaya diri menyampaikan materi	Target tercapai
Keberlanjutan program	Rencana tindak lanjut (RTL) bersama PT PNW	Adanya komitmen literasi hukum rutin	PT PNW menyepakati program literasi 2x/tahun	Target tercapai

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator keberhasilan tercapai, baik dari sisi WNA sebagai penerima manfaat maupun staf PT PNW sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan kegiatan PkM efektif meningkatkan literasi

hukum dan administrasi izin tinggal, serta memberi dampak keberlanjutan bagi Lembaga.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan kegiatan ini

memiliki relevansi yang tinggi, yaitu menyentuh persoalan nyata yang dihadapi WNA di Bali, yakni lemahnya literasi hukum dan administrasi izin tinggal. Hal ini membuat kegiatan dirasakan langsung manfaatnya. Dengan adanya *workshop* simulasi hukum dan administrasi memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga keterampilan praktis. Keterlibatan aktif staf PT PNW sebagai fasilitator membuat kegiatan lebih berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan.

Selain keunggulan ada juga beberapa kelemahan, antara lain keterlibatan peserta yang hanya 65 WNA yang terlibat, sehingga cakupan dampak masih terbatas dibanding jumlah WNA di Bali yang mencapai puluhan ribu per tahun. Selain itu kendala Bahasa dan budaya juga merupakan penghalang dalam sosialisasi. Meski sudah bilingual, peserta dari negara non-Inggris kadang tetap kesulitan memahami istilah hukum yang kompleks. Kelemahan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Fasilitator masih terbatas pada staf PT. PNW, sehingga jika jumlah peserta lebih banyak, diperlukan pendamping tambahan dari akademisi atau praktisi hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di PT PNW berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum dan administrasi izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan pre test dan post test dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan pemahaman secara signifikan tentang literasi hukum dan administrasi atau persyaratan warga negara asing yang datang dan tinggal di Indonesia sebesar 46,4%.
2. Kepuasan peserta pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan meningkat sebesar 15,4%.
3. Terjadi peningkatan partisipasi aktif lebih dari 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yakni membantu WNA memahami prosedur hukum dan administrasi, sekaligus mendukung tertib hukum di Bali sebagai destinasi internasional.

Meskipun demikian, kegiatan ini juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan jumlah peserta yang dilibatkan, kendala bahasa bagi sebagian peserta, serta keterbatasan waktu untuk mendalami kasus-kasus individual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan masih memiliki ruang untuk pengembangan, terutama dalam aspek perluasan cakupan, keberlanjutan, dan inovasi media pembelajaran. Namun, secara umum kegiatan ini memberikan dampak positif baik bagi WNA maupun bagi PT PNW sebagai mitra pelaksana yang memperoleh peningkatan kapasitas dalam memberikan layanan hukum dan administrasi.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan literasi hukum dan administrasi izin tinggal ini perlu dikembangkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Pertama, program serupa dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak WNA, tidak hanya klien PT PNW, tetapi juga komunitas asing yang ada di Bali. Kedua, penyediaan modul edukasi dalam bentuk digital (*ebook*, video, atau webinar) sangat dianjurkan agar akses informasi lebih merata dan dapat dijangkau oleh WNA yang tidak hadir secara langsung.

Ketiga, perlu adanya kolaborasi dengan pihak akademisi, praktisi hukum imigrasi, serta lembaga pemerintah terkait untuk memperkaya materi, meningkatkan kredibilitas, serta memastikan keberlanjutan program. Dengan langkah-langkah tersebut, kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mewujudkan keteraturan hukum, citra positif Bali, dan hubungan harmonis antara WNA dengan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. PNW selaku mitra utama yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, khususnya Warga Negara Asing yang berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan literasi hukum dan administrasi izin tinggal ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Kami juga menghargai kontribusi para fasilitator, staf, serta pihak-pihak terkait yang turut

mendukung pelaksanaan kegiatan, baik dari segi pemikiran, tenaga, maupun sarana prasarana.

Tanpa dukungan dan kerja sama dari semua pihak, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan lancar. Akhir kata, kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam berbagai bentuk kegiatan serupa di masa mendatang, demi terwujudnya peningkatan literasi hukum, tertib administrasi, serta terciptanya iklim yang harmonis bagi Warga Negara Asing di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhuvaneswari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82-97.
- Detik Bali. (2024). https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7630282/275-hari-lupa-urus-izin-tinggal-wn-swiss-diusir-dari-bali?utm_source=chatgpt.com
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip Hukum Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York: Times Books/Henry Hold and Co.
- Pigg, K. E., & Bradshaw, T. K., (2003). Catalytic community development: A theory of practice for changing rural society. In D. L. Brown & L. E. Swanson (Eds.), *Challenges for rural America in the twenty-first century* (pp. 385-396). University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Empiris*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sulistiyowati, E. (2019). Literasi hukum masyarakat dan implikasinya terhadap pelanggaran administrasi kependudukan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 451-470.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2155>

United Nations World Tourism Organization. (2021). *Tourism for Development: Building Peace and Fostering Understanding*. Madrid: UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284422456>.

U.S. Census Bureau. (2000). *State and Country QuickFacts*. Washington, D.C.: United States Bureau of the Census. Retrieved November 7, 2008, from <http://quickfacts.census.gov/qfd/>